

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

Ayuni Tampomury¹
Sofia E Pangemanan²
Fanley N. Pangemanan³

Email Korespondensi: ayunitampomury048@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Infrastruktur adalah sarana yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur mempunyai peranan vital dalam mewujudkan pemenuhan hak pada rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan menyediakan Sarana dan Prasarana infrastruktur jalan guna mempermudah aksesibilitas antar wilayah. Penelitian ini mencoba melihat dan menguraikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali lebih dalam mengenai kinerja organisasi ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pemeliharaan infrastruktur jalan belum sepenuhnya berhasil karena hasilnya belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Daerah, Infrastruktur Jalan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan sebuah pelayanan atau fasilitas yang diberikan dari negara untuk rakyat menjadi bagian pembangunan nasional. Pemerintah pusat sendiri sudah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bagian infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, pengembangan maupun pemeliharaan kedalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Salah satu penyebab rendahnya tingkat produktivitas ekonomi masyarakat adalah kurangnya prasarana transportasi khususnya jaringan jalan yang mendukung sektor produksi dan distribusi hasil-hasil komoditi masyarakat untuk dijual kepasar maupun untuk komoditi ekspor. Akibat keterbatasan jaringan jalan dan kondisi jalan yang kurang baik, menyebabkan tingginya biaya transportasi yang tentu berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan pasal 2 sampai dengan pasal 4 menjelaskan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat

atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air serta diatas permukaan air. Dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang ada sebelumnya.

Minahasa Tenggara adalah daerah kabupaten yang terdiri dari 12 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 135 desa. Pemeliharaan jalan di beberapa kecamatan masih dikategorikan buruk dikerenakan ada beberapa akses jalan yang belum diperbaiki selama bertahun-tahun seperti sebagian jalan Raya Tombatu, Jalan Raya Touluaan, Jalan Tombatu – Tonsawang, jalan Tombatu-Pisa, jalan Mundung-Kuyanga, dan sejumlah jalan di desa Silian. Kondisi jalan yang memprihatinkan tentunya mengganggu masyarakat pengguna jalan terutama saat berkendara..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam hal ini peneliti melakukan pengambilan data di Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

Yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kualitas layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap Pemeliharaan Jalan.
2. Responsibilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengenali kebutuhan masyarakat pengguna jalan.
3. Melihat Responsibilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara apakah sudah sesuai prosedur administrasi atau belum dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan.
4. Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengelola sumber dana untuk pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

Berikut ini merupakan pernyataan langsung dari hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara "Terkait Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara Program apa saja yang sudah dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara?"

"Yang pertama perlu diketahui jalan di kabupaten Minahasa Tenggara itu ada terdiri Jalan Nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Jalan Provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan Jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten. Program apa, setiap tahun itu ada yang namanya program rekonstruksi jalan dan rehab jalan termasuk disitu pembangunan-pembangunan jalan baru."

"Apakah program-program tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau tidak?"

"Sampai saat ini on track. Sesuai dengan rencana."

"Apakah ada kendala yang menghambat proses pemeliharaan infrastruktur jalan?"

"Sampai saat ini tidak ada."

"Bagaimanakah sistem pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara?"

"Sistem pemeliharaan jalan itu ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Ada yang dilaksanakan secara swakelola, ada yang dilaksanakan secara kontraktual."

"Apakah dalam menjalankan program-program ini ada masyarakat yang datang secara langsung ke Dinas

PUPR Mitra untuk melakukan pengaduan mengenai ketidaknyamanan infrastruktur jalan di kabupaten Minahasa Tenggara?"

"Sering."

"Lalu bagaimana pihak Dinas PUPR menanggapi hal tersebut?"

"Ehh.. terkait dengan ajuan.. dan saran atau mungkin kritik dari masyarakat, pihak Dinas Pekerjaan umum melakukan kajian terkait dengan laporan-laporan tersebut untuk ditindak lanjuti.."

Selanjutnya penulis mewawancarai salah satu pegawai Bidang Bina Marga yang bertugas dibidang Jalan dan Jembatan dengan harapan mendapatkan informasi lebih lagi mengenai program yang berjalan. Pertanyaan yang ditanyakan masih mengenai program pemeliharaan jalan dikabupaten Minahasa Tenggara.

"Bagaimanakah Sistem Pemeliharaan Jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Minahasa Tenggara?"

Depe sistem pemeliharaan jalan torang survei dulu lia depe tingkat kerusakan. Setelah torang survei lapangan torang lia depe tingkat kerusakan, data itu torang bawa dibidang untuk pengolahan eh apa, untuk pengolahan pembuatan RAD. Jadi depe penanganan diruas jalan bersangkutan sesuai dengan keberadaan yang berada dihasil survei itu. Cuma itu depe sistem.."

Kalau dalam pelaksanaan program apakah ada kendala atau hambatan yang menghalangi proses pelaksanaan program?

"Kalu dalam pelaksanaan kalu itu torang survei dengan perencanaan yang bagus, maka dalam pelaksanaan mungkin bisa meminimalizirkan resiko yang terjadi dilapangan. Jadi pada prinsipnya perencanaan yang baik

maka dalam pelaksanaan juga pasti baik."

Apakah dalam menjalankan program ada masyarakat yang datang ke kantor Dinas PUPR melakukan pengaduan mengenai ketidaknyamanan kondisi jalan?"

"Mungkin dari beberapa paket ada yang melakukan pengaduan karena berdasarkan hasil pengaduan dari masyarakat, kami dari Dinas PUPR menindaklanjuti. Setelah ada beberapa masyarakat yang datang torang turun lapangan dan menindaklanjuti dengan survei apabila sesuai dengan keluhan dari masyarakat. Karena adakalanya dari masyarakat itu ada beberapa kategori.. mungkin karena dorang lia kondisi dilokasi padahal setelah dari torang Dinas PUPR survei dipelaksanaan ternyata mungkin.. contoh dang misalkan kalo dalam pelaksanaan itu misalkan dorang mengadu itu ruas jalan kabupaten ah torang langsung tindak lanjuti kalo soal ruas jalan kabupaten. Tapi kalo dia masuk diruas jalan provinsi, kami dari pihak Dinas kabupaten menyurat ke provinsi. Kalopun dia maso diruas jalan dari pusat dari balai, nah kami menyurati ke balai. Jadi depe dana kan juga menyurat tudia berdasarkan aset. Kalo dia aset dikementrian dalam hal ini balai dan torang menyurat ke sana dalam hal ini balai untuk segera menangani misalkan kalu ada jalan yang longsor apa samua menyangkut jalan yang rusak kalo dia provinsi yah torang menyurat kesana. Kalo dari jalan kabupaten yah kami Dinas PUPR mungkin melapor ke pimpinan torang bisa kase di APBD perubahan ato direguler untuk pengajuan 2024 berdasakan hasil tingkat kerusakan dilapangan, kalopun dia mendesak ya harus seijin dari pimpinan."

Kalau berdasarkan program tahun 2022 jalan mana saja yang menjadi fokus dari Dinas PUPR dalam hal pemeliharaan jalan?”

“Kalu pemeliharaan kan ada dua kwa.. pemeliharaan badan jalan dalam pengerasan atau galian sedimen toh itu yang pemeliharaan tapi kalo untuk fisik dalam hal ini rehab bagini depe paket banyak. Kalu pemeliharaan juga kan ruas-ruas jalan yang masuk diwilayah jalan kabupaten kalu untuk yang tahun lalu dang. Kalu rupa dikecamatan-kecamatan sodi desa-desa itu masuk diaset jalan kabupaten karena ada yang rupa tahun lalu diseputaran pemukiman itu yang diprioritaskan, yang tadinya Cuma jalan tanah ditingkatkan jadi potmis atau dari jalan tanah itu ditingkatkan jadi lapen. Dan itu kalau adakalanya dana desa kan dorang so buka. Tapi yang jadi kendala tudia ada kalanya dari dana desa tudia dorang buka jalan baru belum ta include di SK Jalan jadi dorang usul juga ke dinas untuk masuk di SK Jalan. Supaya kedepan setelah dorang buka jalan itu, buka untuk ruas jalan itu, kedepan Pemkab boleh maso dengan catatan so maso di SK jalan yang so ada peraturan bupati dang.. karena kalo menyangkut aset itu kan nda sembarang untuk yaa kase anggaran disitu sabantar direkon aset akan bermasalah. Jadi usulan-usulan dari desa itu torang mo cek dulu adakalanya kan usulan masuk dimusrembang, kecamatan, kabupaten, ataupun ada pikir-pikir dari dewan kalo dia masuk di SK Jalan itu yang usulan musrembang yaa..torang tindak lanjuti..”

Melalui pernyataan-pernyataan dari kedua informan, program

pemeliharaan jalan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Namun pernyataan-pernyataan tersebut belum lengkap tanpa adanya informasi dari masyarakat sebagai pengguna infrastruktur jalan. Maka dari itu penulis mewawancarai salah satu masyarakat untuk memperjelas penelitian ini.

Berikut adalah hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat minahasa tenggara dalam hal ini bapak Berti Tuda selaku masyarakat yang mengetahui banyak informasi tentang kondisi jalan yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

“Bagaimana tanggapan bapak mengenai kondisi infrasrtuktur jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara?”

“Salah satu kondisi jalan yang memprihatinkan adalah jalan yang menghubungkan antara Tonsawang dengan Tombatu yang sebagiannya rusak, deng depe pemeliharaan kan rupa ba momaras ato pembersihan jalan itu ada depe anggaran-anggaran dari PUPR. Cuman kan torang selaku masyarakat ya menunggu respon dari pemerintah Kabupaten dalam hal ini dari dinas PUPR. Rupa jalan Tonsawang-Mundung deng jalan Tonsawang-Moreah kan itu musti ada depe pemeliharaan. Kalu jalan di Mitra kan masih banyak yang perlu diperbaiki macam jalan Tombatu – Tonsawang, Tombatu – Pisa, jalan di Silian Raya, dan jalan di Tombatu Raya khususnya di kompleks pompa minya itu sangat memprihatinkan depe kondisi jalan. Itu kalo turun ujang terendam skali.. banyak lubang kong punung aer. Itu sangat memprihatinkan

pa torang pe daerah Minahasa Tenggara ini.

“Bagaimana kinerja Pemerintah daerah dalam hal ini dinas PUPR dalam melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jalan?”

“Memang selama ini dorang ada ja melaksanakan pemeliharaan jalan rupa jalan Mundung – Tonsawang, jalan yang menghubungkan Ratatotok dengan Soyoan Moreah.. mar masih banyak tu ruas jalan yang perlu dorang perhatikan. Jadi kalo soal kinerja ya tentunya belum bisa dikatakan maksimal.

“Apa yang menjadi harapan bapak terkait pemeliharaan jalan di Kabupaten Mitra?”

“Selaku masyarakat menhgharapkan dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas PUPR supaya terus melaksanakan pemeliharaan jalan supaya lancar tu akses jalan karna masih banyak ruas jalan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.”

Kinerja pengawasan dan Pemeliharaan Jalan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dianggap sudah maksimal sesuai dengan prosedur yang ada. Hal itu dilihat dari kualitas kerja pemerintah Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjalankan serta mengawasi program pemeliharaan jalan.

Namun beda halnya dengan pendapat masyarakat yang menilai bahwa pemerintah Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara belum melaksanakan pemeliharaan jalan dengan maksimal, belum sesuai ekspektasi masyarakat karena masih banyak kondisi ruas jalan yang belum diperbaiki. Di beberapa Kecamatan yakni Belang, Pasan, Tombatu, Silian, Touluaan, masih memerlukan pemeliharaan Jalan/Rehabilitasi Jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara, salah satu kendala yang membuat pekerjaan pemeliharaan jalan tidak maksimal yaitu keterbatasan dana. Keterbatasan dana tentunya sangat berpengaruh dalam hal pengadaan alat untuk pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Keadaan alat yang memadai disertai dana yang cukup akan menghasilkan pemeliharaan jalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penutup Kesimpulan

1. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara masih tergolong belum maksimal dan tidak sepenuhnya berhasil. Itu dikarenakan masyarakat menilai hasil kerja yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat.
2. Kinerja yang telah ditunjukkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara sudah dianggap baik karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun masyarakat menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara belum

melakukan seperti yang diharapkan masyarakat.

3. Masih kurangnya sikap transparansi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara

Saran

1. Dalam melaksanakan tugas dan program – program pemeliharaan jalan, anggota dinas pekerjaan umum Kabupaten Minahasa Tenggara di harapkan mampu menerapkan sistem kerja yang sesuai dengan jobdesk masing-masing, agar setiap program yang berlangsung dapat di selesaikan dan dituntaskan sesuai dengan perencanaannya.
2. Tingkatkan lagi pengawasan dalam menjalankan program pemeliharaan jalan di kabupaten Minahasa Tenggara. Partisipasi anggota dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Minahasa Tenggara dianggap berperan penting dalam terlaksananya pemeliharaan jalan yang sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Minahasa Tenggara.
3. Jika dalam pelaksanaan program pemeliharaan jalan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara belum bisa menjangkau beberapa wilayah dikarenakan keterbatasan dana, seharusnya dari pihak dinas mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk menindaklanjuti

kondisi jalan rusak di beberapa wilayah kecamatan yang belum ditindaklanjuti.

Daftar Pustaka

- Fauzi, Akhmad., NA, Rusdi Hidayat. (2020) : Manajemen Kinerja. Airlangga University Press
- Mulyo, Sulistijo Sidarto. (2018) : Proyek Infrastruktur dan sengketa Konstruksi. Prenadamedia Group (Divisi Kencana)
- Nofriansyah, Deny. (2018) : Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. DEEPUBLISH
- Rukin. (2019) : Metodologi Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar cendekia Indonesia
- Ransun, F.C. Yohanes., Kalangi, Ferddie., dan Sendow, Yurnie. (2017). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah. Jurnal Universitas Sam Ratulangi.
- Suardo, Imam Haryanto. (2018) : Perencanaan Geometrik Jalan: Standar dan Dasar-Dasar Perancangan. UGM PRESS
- Suwendra, Wayan. (2018) : Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. NILACAKRA
- Undang-Undang:
UU RI No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Sumber lainnya:
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara